



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2023 telah melaksanakan amanat terkait Manajemen Kinerja ASN dan Transformasi SKP sesuai dengan Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menginisiasi penyusunan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mengatur pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja individu di lingkungan Basarnas. Selain itu pengoptimalan penggunaan aplikasi e-Kinerja BKN dan aplikasi e-Performance sebagai aplikasi pemantauan dan pelaporan kinerja individu dan organisasi yang dipergunakan sebagai tools dalam manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungan Basarnas.

Pada Tahun 2022, terdapat Perubahan Renstra (Review Renstra) yang disusun berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Salah satunya adalah perubahan Struktur Organisasi yang semula ***Biro Perencanaan dan Kerjasama*** menjadi ***Biro Perencanaan dan Keuangan***.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB yang menyatakan bahwa perlu disempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perubahan Indikator IKU dan Manual IKU yang semula mengikuti aturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No: SK.KBSN-78/PR.02.02/XI/BSN-2022 menjadi SK.KBSN-20278/PR.02.02/XI/BSN-2023 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Manual IKU.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Unit Kerja yang menginisiasi Pemberian Penghargaan atas Kinerja UPT Basarnas telah menyusun Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghargaan atas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang dijadikan dasar penilaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada UPT Terbaik.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pecarian dan Pertolongan	100	92,59	92,59%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	74,01	101,38%
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	88,77	93,44%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	100%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	100	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	85,46	106,8%
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,31	108,6%
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPNP	100%	816,58%	816,58%
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				179%

Dari hasil evaluasi Indikator Kinerja dari setiap pelaksanaan sasaran dan target dalam dokumen PK Tahun 2024, tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, total rata-rata capaian adalah 179% atau lebih dari 100%. Di masa mendatang kiranya kondisi ini akan dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan hasil evaluasi ini juga menjadi salah satu faktor penilaian dalam penetapan predikat organisasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Penilaian Kinerja Organisasi menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Oleh sebab itu perlunya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja demi mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memperbaiki kinerjanya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan kinerja Biro Perencanaan di masa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Siswanta, S.E.

Marsekal Pertama TNI

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1. Kedudukan .....	3
2. Tugas .....	3
3. Struktur Organisasi .....	3
C. POTENSI DAN PERASALAHAN .....	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	8
1. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator .....	8
2. Aktivitas Kegiatan pendukung Sasaran .....	16
3. Prosedur Pengumpulan Data .....	21
B. PERJANJIAN KINERJA .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	26
B. PENGUKURAN KINERJA .....	27
1. Sasaran 1: Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan .....	27
a. Capaian SK 1 .....	27

b. Analisis SK 1 .....	35
2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga .....	41
a. Capaian SK 2 .....	41
b. Analisis SK 2 .....	44
3. Sasaran 3: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel .....	49
a. Capaian SK 3 .....	49
b. Analisis SK 3 .....	55
C. REALISASI ANGGARAN .....	61
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. KESIMPULAN .....	75
B. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA .....	75
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN OLEH APIP BASARNAS .....	76

LAMPIRAN :

PENGUKURAN KINERJA SESUAI PERJANJIAN KINERJA 2024

HASIL CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TAHUN 2024

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan .....	4
Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran Basarnas .....	9
Gambar 2.2. Tujuan dan Sasaran Biro Perencanaan dan Keuangan .....	10
Gambar 2.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	21
Gambar 2.4. Cascading Sasaran .....	22
Gambar 2.5. Perjanjian Kinerja 2024 .....	23
Gambar 2.6. Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2024 .....	25
Gambar 3.1. Hasil SAKIP .....	30
Gambar 3.2. Peningkatan Nilai SAKIP dan RB .....	31
Gambar 3.3. Hasil Nilai NKA .....	34
Gambar 3.4. Nilai IKPA .....	52
Gambar 3.5 Nilai Opini BPK.....	55



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Cascading Sasaran Strategis, Program, Kegiatan .....	11
Tabel 2.2. Definisi dan Penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan.....	14
Tabel 2.3. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Aktivitas Biro Renkeu .....	18
Tabel 2.4. Detail Kinerja Berbasis Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	20
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan .....	26
Tabel 3.2. Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1) .....	28
Tabel 3.3. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran .....	29
Tabel 3.4. Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1) .....	35
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1) .....	36
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1) .....	37
Tabel 3.7. Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 1 .....	39
Tabel 3.8. Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2) .....	41
Tabel 3.9. Jumlah Satker yang tepat waktu pengumpulan data .....	44
Tabel 3.10. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan 2 (SK2) .....	45
Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 ( SK 2 ) .....	45
Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) .....	46
Tabel 3.13. Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 2 .....	48
Tabel 3.14. Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) .....	50
Tabel 3.15. Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3) .....	55
Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3) .....	56
Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3) .....	57

Tabel 3.18. Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 3 .....	59
Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan .....	61
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Per Kegiatan / Aktivitas dalam Rencana Aksi ..	62
Tabel 4.1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi APIP .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 4 Tahun 2016 tentang Implementasi sistem SAKIP di lingkungan Badan SAR Nasional bahwa Unit kerja eselon II juga diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan anggaran. SAKIP ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan.

Biro Perencanaan dan Keuangan dijalankan melalui satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Sebagai upaya dukungan terhadap mewujudkan sasaran organisasi, langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja sebagai dasar penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan, langkah nyata adalah pengisian e-Kinerja BKN sudah memperhatikan PK dari Pimpinan Langsung secara *Cascading dan Crosscutting*;
2. Melakukan pemantauan secara berkala yang tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik dalam menentukan Capaian Kinerja Organisasi dan pemberian Predikat bagi seluruh pegawai Basarnas sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Memanfaatkan hasil pengukuran berkala sebagai bahan pengambilan keputusan atau penyesuaian strategi dalam mencapai target program dan kegiatan eksisting sebagai upaya perbaikan pengelolaan manajemen kinerja. Langkah nyata pemantauan kinerja secara triwulanan, dengan Pimpinan memberikan umpan balik atas hasil kinerja bawahannya, dan

memberikan predikat kinerja sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Menginput seluruh Dokumen SAKIP ke e-SAKIP Reviu Kementerian PANR, meliputi: Dokumen Renstra, Reviu Renstra, Reviu IKU dan Manual IKU, PK, RKT, Rencana Aksi dan Pemantauan Rencana Aksi, DPA/POK, Pohon Kinerja dan *Cascading*, Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal dan tindaklanjutnya, Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan 1, 2, 3 dan 4, Pedoman Teknis Perencanaan, Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja, serta Pedoman Evaluasi SAKIP Internal.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2024, melalui Surat Perintah Sekretaris Utama Nomor-2155/OT/06.02/II/BSN-2024 ditetapkan 19 (sembilan belas) Tim Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan yang mendukung pencapaian kinerja utama Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun tim kerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuanagn adalah sebagai berikut:

1. Tim Kerja Implementasi dan Pengelolaan Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
2. Tim Kerja Perencanaan, Penyetoran dan Pelaporan PNBPNBP
3. Tim Kerja Penyajian Laporan Keuangan
4. Tim Kerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Auditor
5. Tim Kerja PIPK (Pengendalian Internal Pelaporan Kuangan)
6. Tim Kerja Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
7. Tim Kerja Layanan Permintaan Pembayaran Kantor Pusat
8. Tim Kerja Layanan Belanja Pegawai
9. Tim Kerja Layanan Pengelolaan Kas Negara
10. Tim Kerja Penyajian Arsip Keuangan
11. Tim Kerja Penyusunan Dokumen Sakip
12. Tim Kerja Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan
13. Tim Kerja Pemantauan Kinerja
14. Tim Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

15. Tim Kerja Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan
16. Tim Kerja Penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah Basarnas
17. Tim Kerja Pinjaman Luar Negeri, Hibah dan SBSN
18. Tim Kerja Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK)
19. Tim Kerja Tata Usaha Dan Rumah Tangga Biro

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kedudukan Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Salah satunya adalah perubahan Struktur Organisasi yang semula **Biro Perencanaan dan Kerjasama** menjadi **Biro Perencanaan dan Keuangan** berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Utama Basarnas.

1. Biro Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran; Penyiapan koordinasi rencana, program dan anggaran;
  2. Penyiapan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta penyiapan penyusunan program dan rencana anggaran;
  3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program, anggaran dan kinerja;
  4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro



### 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tersebut mendorong perubahan birokrasi Basarnas menjadi lebih efektif dan efisien. Pengalihan tersebut diikuti dengan penetapan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK-KBSN-197/OT.05/IX/BSN- 2020 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di lingkungan Kantor Pusat, serta pelantikan para pemangku jabatan fungsional dan jabatan struktural pada Desember 2020.

#### **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2024, sebanyak 42 orang yang terdiri dari:

- |   |      |       |
|---|------|-------|
| a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan | : 1  | Orang |
| b. Jabatan Fungsional Tertentu          | : 22 | Orang |
| c. Jabatan Pelaksana                    | : 18 | Orang |
| d. PPPK                                 | : 1  | Orang |

Dengan klasifikasi:

- |                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| a. Berdasarkan Pendidikan |      |       |
| 1. Sarjana Muda / DIII    | : 1  | Orang |
| 2. Sarjana / S1           | : 29 | Orang |
| 3. Magister / S2          | : 11 | Orang |
| 4. TNI                    | : 1  | Orang |

### C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama Basarnas secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Basarnas melalui upaya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran, peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, dan peningkatan kualitas manajemen keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu Biro Perencanaan dan Keuangan juga sebagai salah satu motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses koordinasi penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan juga memberikan dukungan di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran unit kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis. Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Basarnas, sebab Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi SDM yang andal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masih perlu dipenuhi sesuai standar.
2. Kurang optimalnya pemahaman posisi strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mengoordinasikan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di Basarnas. Sehingga masih kesulitan terhadap data

dan ketepatan waktu laporan. Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki wewenang untuk mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada unit kerja di lingkungan Basarnas. Posisi ini merupakan posisi yang strategis bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengatur sistem dan prosedur perencanaan dan keuangan serta pemantauan dan evaluasi sehingga unit kerja taat pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Sarana dan prasarana lain yang belum optimal adalah sarana digital atau Sistem Informasi internal yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. Sarana digital tersebut sangat berguna dalam meminimalisir human error, menyamakan persepsi dan sharing data antar unit di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan yang hingga saat ini belum dapat terealisasi. Kelemahan tersebut membuat tingkat kecepatan kerja menjadi lambat dan tidak efisien, yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan Basarnas.
4. Adanya kebijakan eksternal seperti *Automatic Adjustment* yang dilakukan menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi perencanaan pelaksanaan kegiatan di Basarnas. Beberapa kegiatan harus mengalami beberapa penyesuaian strategi khususnya dalam akselerasi penyerapan anggaran Basarnas.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya manusia, potensi dan permasalahan, serta sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja



Pada bab ini memuat peta strategis Basarnas, ringkasan ikhtisar rencana strategis Basarnas, cascading dari sasaran program ke sasaran kegiatan, Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, dan capaian output kegiatan serta kegiatan/aktivitas yang akan dijadikan rencana aksi dalam mencapai sasaran kegiatan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan analisis capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, prestasi dan capaian, realisasi dan efisiensi anggaran tahun berjalan, serta tindak lanjut LHE APIP Basarnas.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut.

5. Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan 2023-2024 telah direvisi untuk revisi ke 3. Renstra Birorenkeu disusun berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 22 Agustus 2022. Salah satunya adalah perubahan Struktur Organisasi yang semula **Biro Perencanaan dan Kerjasama** menjadi **Biro Perencanaan dan Keuangan**. Visi Misi masih sesuai dengan Visi Misi lembaga.

##### 1. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Indikator

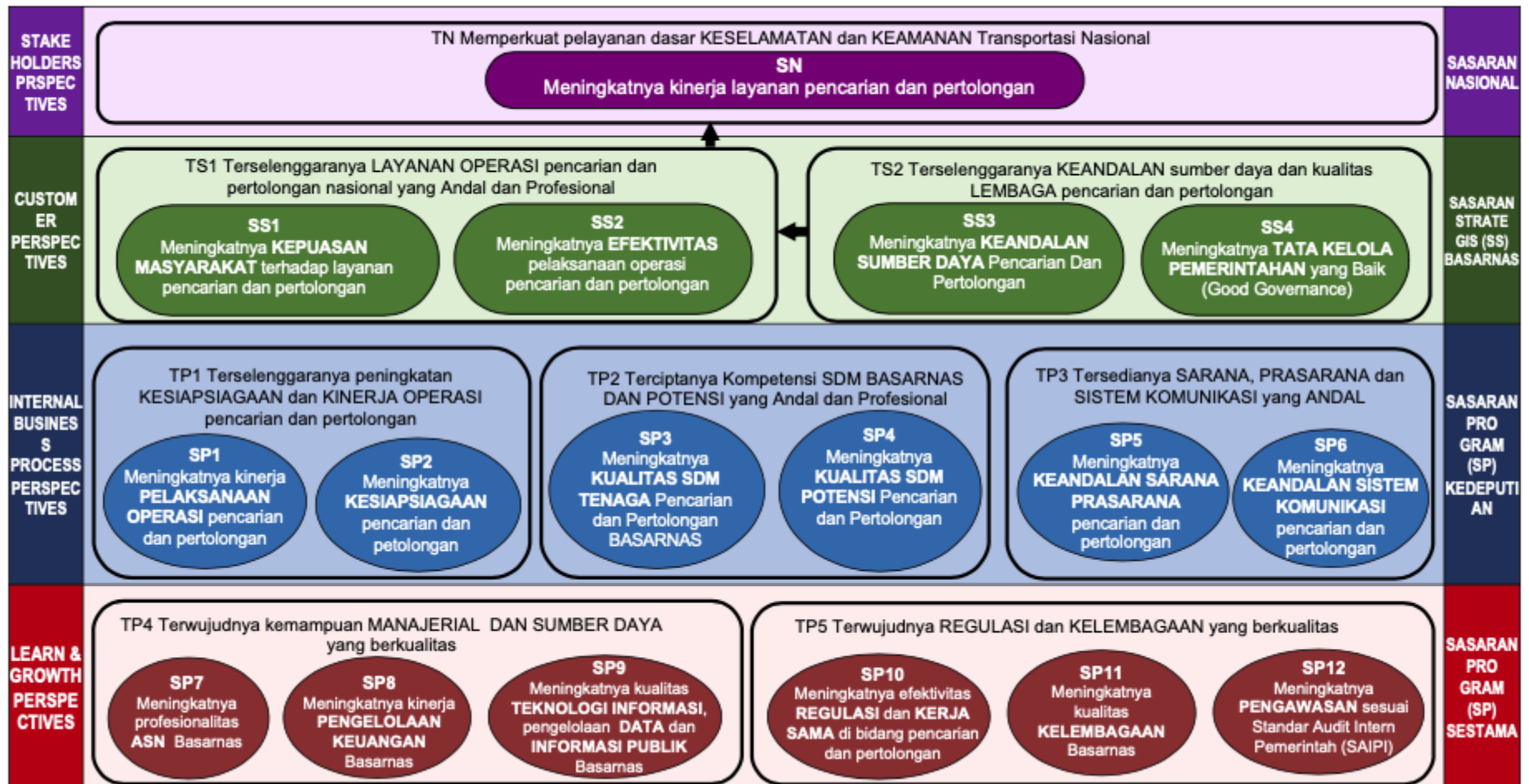
Penyusunan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan memperhatikan/mengacu Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan *perubahan (Reviu)* Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Visi Basarnas: Terwujudnya Pencarian dan Pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian Visi Misi Presiden dan wakil Presiden “Indonesia yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

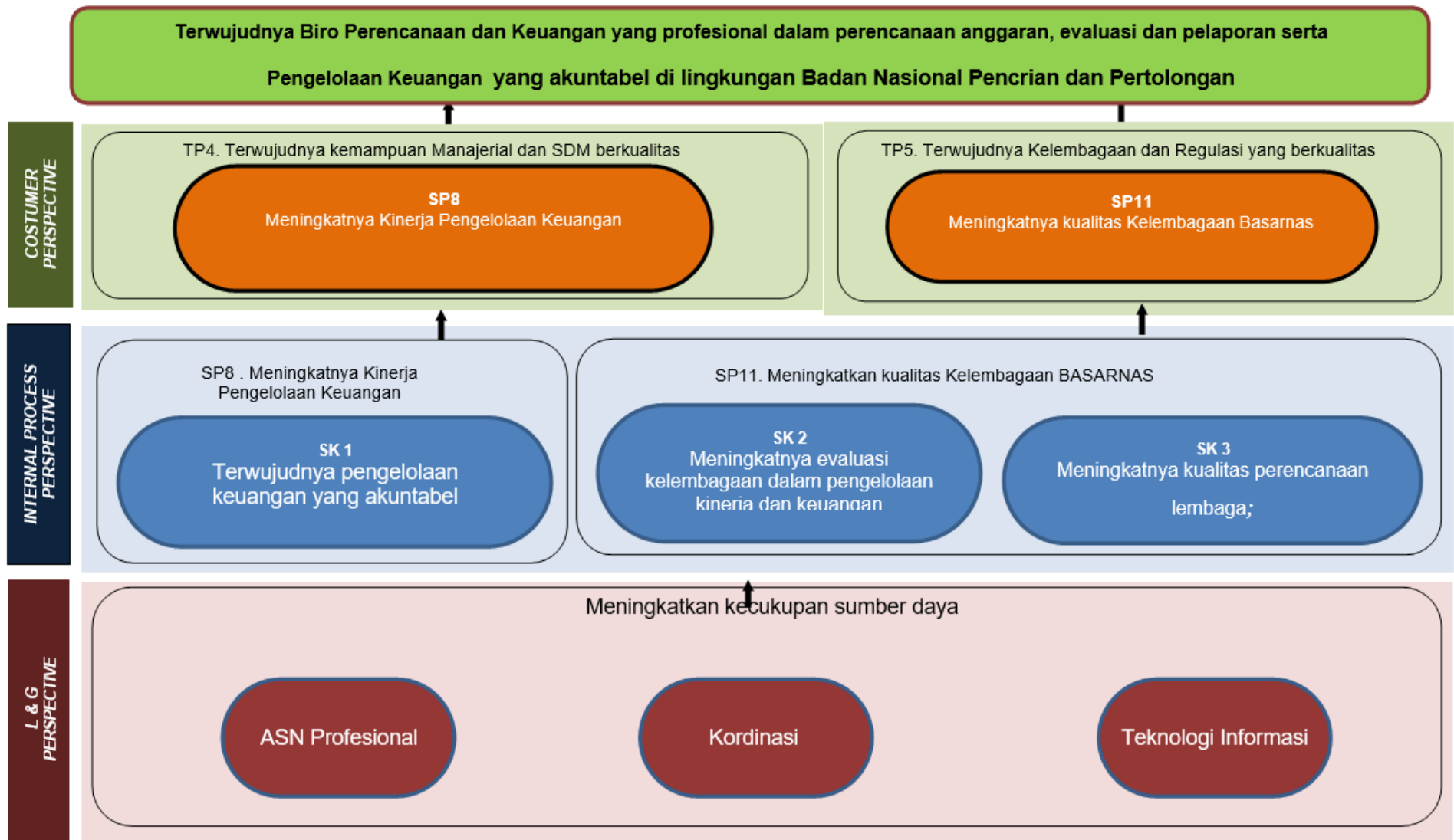
Misi Basarnas adalah:

- Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia
- Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

# TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024



Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai turunan dari Sekretariat Utama

Tabel 2.1. Cascading Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Revisi			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</b>					2.253.648	2.267.460	1.967.177	1.888.027	4.434.938	
<b>SASARAN STRATEGIS LEMBAGA</b>										
	SS.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> )									BASARNAS
	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				76	76				Sekretaris Utama
<b>PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen</b>										
	SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				747.861	859.573	907.507	860.202	1.367.805	Sekretariat Utama
	IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				WTP	WTP				Biro Renkeu)
	SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan									Sekretariat Utama
	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				BB	BB				Biro Renkeu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Revisi			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEGIATAN 12 : Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan</b>					16.793	18.571	16.415	543.581	755.837	
	SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan									Biro Renkeu
	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				100	100				
	IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja				72	73				
	IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran				95	95				
	SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga									Biro Renkeu
	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)				< 5 %	< 5 %				
	IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program				100	100				
	SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel									Biro Renkeu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Revisi			Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020 s.d 2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP		80	80						
	IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		85)	85						
	IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB		100	100						
	IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		WTP	WTP						

Perubahan Indikator beserta Manual IKU yang tertuang dalam SK. KBSN No-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Basarnas dan Manual IKU di rubah menjadi menjadi No SK. KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023. Kegiatan / aktifitas dan Langkah langkah strategis dalam mendukung Sasaran dan meningkatkan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Definisi dan Penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / AKTIVITAS		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan BNPP	persentase	Mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.
	IKSK. 11.1.1.b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja	nilai	Mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja dari Kementerian PAN-RB
	IKSK. 11.1.1.d	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	nilai	Mengukur penilaian kinerja anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
SK. 11.1.2 Meningkatnya Kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 11.1.2.a	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	persentase	Mengukur persentase jumlah anggaran yang diblokir dalam DIPA  $\% = \left( \frac{\text{Jumlah anggaran yang diblokir}}{\text{Jumlah pagu anggaran pada DIPA}} \right) \times 100$
	IKSK. 11.1.2.b	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	persentase	Mengukur persentase jumlah unit kerja yang tepat waktu dalam menyampaikan data usulan rencana dan program
SK.	IKSK.	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan	persentase	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi total temuan dan dikalikan 100%



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / AKTIVITAS		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
8.2.2  Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	8.2.2.a	hasil Audit APIP		
	IKSK. 8.2.2.b	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Nilai Indeks dari Kementerian Keuangan dalam aplikasi OMSPAN (sistem monitoring perbendaharaan dan anggaran negara)
	IKSK. 8.2.2.c	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP	persentase	Realisasi Penerimaan PNBP/ Target yang diterima dikalikan 100%
	IKSK. 8.2.2.d	Opini BPK RI atas laporan keuangan Basarnas	Opini	Opini dari BPK sesuai hasil penilaian sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan

## 2. Aktivitas Kegiatan pendukung Sasaran

Aktivitas pendukung sasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian atau peningkatan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan atau target tertentu. Aktivitas pendukung sangat penting dalam konteks mencapai indikator sasaran karena mereka memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dan mempercepat pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Aktivitas Biro Renkeu

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Target sesuai PK 2024	AKTIVITAS (DIPA/POK)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	Penyusunan Laporan Tahunan
				Penyusunan Laporan-laporan dan Paparan-paparan Eksternal
				Instrumen Penilaian Kinerja UPT (Reward Punishment)
				Pengendalian Kinerja dan Aktivitas Rencana Aksi UPT
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian	73	Asistensi Dokumen SAKIP UPT
				Asistensi Dokumen SAKIP Unit Eselon I, II dan Balai Diklat
				Penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga, Sekretariat Utama dan Biro RenKeu
				Review Indikator dan Manual IKU
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 4 dan Tahunan
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 1
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 2
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 3
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW I
Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW II				
Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW III				
Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW IV				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Target sesuai PK 2024	AKTIVITAS (DIPA/POK)
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA
				Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas
				Penyusunan Renstra Basarnas Tahun 2025-2029
				Penyusunan Rancangan Krisna-Renja Basarnas TA 2025
				Penyusunan Krisna-Renja Basarnas TA 2025
				Pemutakhiran Krisna-Renja Basarnas TA 2025
				Pembinaan Aparatur Perencanaan
				Peningkatan Kompetensi Perencanaan
				Penyusunan Krisna-Renstra Basarnas Tahun 2025-2029
				Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-KL) Pagu Kebutuhan TA 2025
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Indikatif TA 2025
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	Seluruh Komponen dalam Substansi Sistim Akutansi Internal (SAI)
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	Seluruh Komponen dalam Substansi anggaran dan substansi perbendaharaan
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNPB	100	Seluruh Komponen dalam Substansi anggaran dan substansi perbendaharaan
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	Seluruh Komponen dalam Substansi Sistim Akutansi Internal (SAI)

Berikut ini adalah RO (Capaian Output) fisik, anggaran pagu awal dan target kinerja 2024 untuk aktivitas yang mendukung sasaran dan indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan:

Table 2.4 Detail Kinerja Berbasis Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

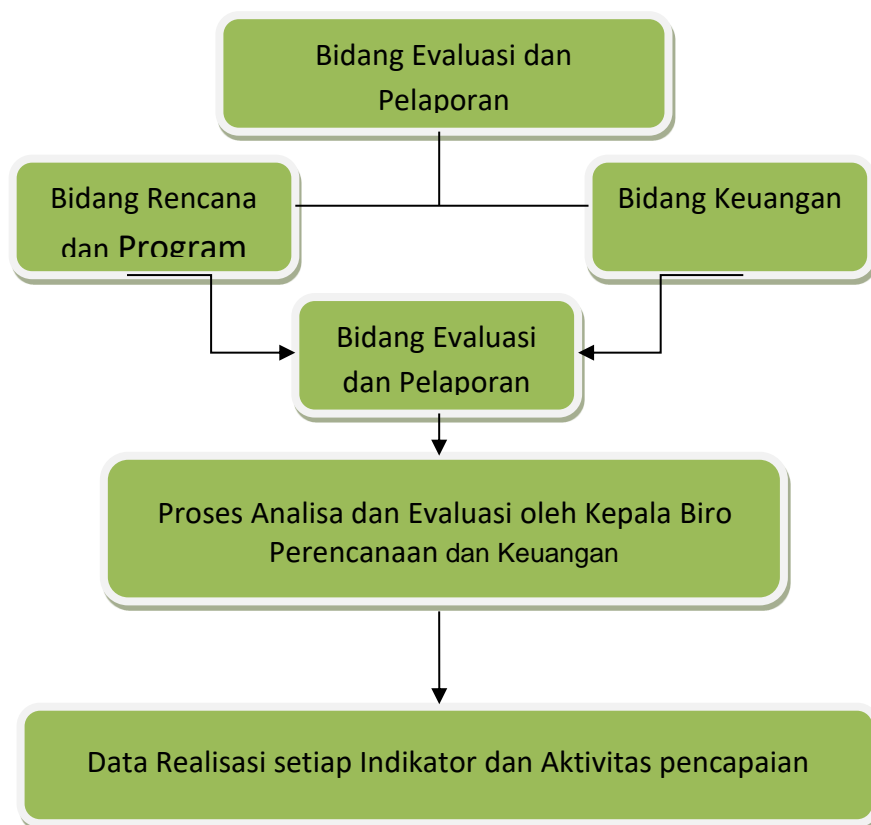
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2024	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU	TARGET RO	PAGU
						AWAL
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	Penyusunan Laporan Tahunan	1 dok	75.670.000
				Penyusunan Laporan-laporan dan Paparan-paparan Eksternal	1 dok	21.000.000
				Instrumen Penilaian Kinerja UPT (Reward Punishment)	1 dok	33.615.000
				Pengendalian Kinerja dan Aktivitas Rencana Aksi UPT	1 dok	697.323.000
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	Asistensi Dokumen SAKIP UPT	1 dok	280.526.000
				Asistensi Dokumen SAKIP Unit Eselon I, II dan Balai Diklat	1 dok	99.566.000
				Penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga, Sekretariat Utama dan Biro RenKeu	1 dok	39.500.000
				Review Indikator dan Manual IKU	1 dok	81.241.000
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 4 dan Tahunan	1 dok	43.245.000
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 1	1 dok	43.245.000
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 2	1 dok	43.245.000
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 3	1 dok	43.245.000
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW I	1 dok	158.161.000
				Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW II	1 dok	116.236.000
Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW III	1 dok			175.716.000		
Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW IV	1 dok			178.466.000		
2	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	Penyusunan lap. analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Dev. Hal. III DIPA	1 dok	367.598.000
				Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	1 dok	687.542.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2024	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU	TARGET RO	PAGU
						AWAL
1	2	3	4	7	8	9
				Penyusunan Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	1 dok	847.450.000
				Penyusunan Rancangan Krisna-Renja Basarnas TA 2025	1 dok	53.091.000
				Penyusunan Krisna-Renja Basarnas TA 2025	1 dok	47.050.000
				Pemutakhiran Krisna-Renja Basarnas TA 2025	1 dok	49.550.000
				Pembinaan Aparatur Perencanaan	1 dok	205.312.000
				Peningkatan Kompetensi Perencanaan	1 dok	60.000.000
				Penyusunan Krisna-Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	1 dok	52.550.000
				Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	1 dok	262.606.000
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-KL) Pagu Kebutuhan TA 2025	1 dok	370.044.000
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Indikatif TA 2025	1 dok	208.480.000
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025	1 dok	112.686.000
				Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025	1 dok	367.598.000
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	Publikasi Laporan keuangan	1 dok	52.048.000
				Penyusunan laporan keuangan	1 dok	250.000.000
				Rekonsiliasi laporan keuangan	1 dok	70.000.000
				konsolidasi laporan keuangan	1 dok	56.000.000
				Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	111.000.000
				Monitoring pelaksanaan dan pelaporan keuangan	1 dok	378.187.000
				Peningkatan kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	49.500.000
				Reviu Laporan Keuangan	1 dok	115.000.000
				Telaah Laporan keuangan	1 dok	45.000.000
				Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	49.700.000
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	Pengelolaan dan evaluasi revisi anggaran	1 dok	250.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Anggaran	1 dok	450.000.000
				Evaluasi Implementasi Kebijakan/Peraturan dan	1 dok	80.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2024	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU	TARGET RO	PAGU	
						AWAL	
1	2	3	4	7	8	9	
				Pengembangan Data Tematik di Bidang Penganggaran di Basarnas			
				Evaluasi Kinerja Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran K/L (IKPA)	1 dok	80.000.000	
				Peningkatan Kompetensi Anggaran	1 dok	50.000.000	
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPNP	100%		Perencanaan dan Penyusunan atas Jenis dan Tarif PNBPNP	1 dok	85.380.000
					Koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Penggunaan PMK. Volatil PNBPNP Basarnas	1 dok	100.000.000
					Sosialisasi Pengelolaan PNBPNP 2024	1 dok	100.000.000
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP		Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	1 dok	81.000.000
					Laporan Hasil Pemeriksaan	1 dok	50.000.000

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari masing-masing bidang di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu, bidang rencana dan program, bidang evaluasi dan pelaporan, serta bidang keuangan. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

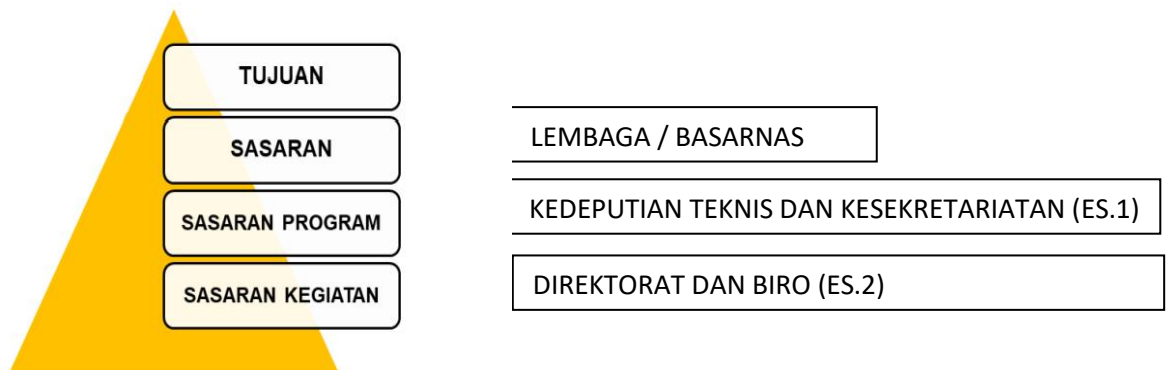


Gambar 2.3 Prosedur Pengumpulan Data

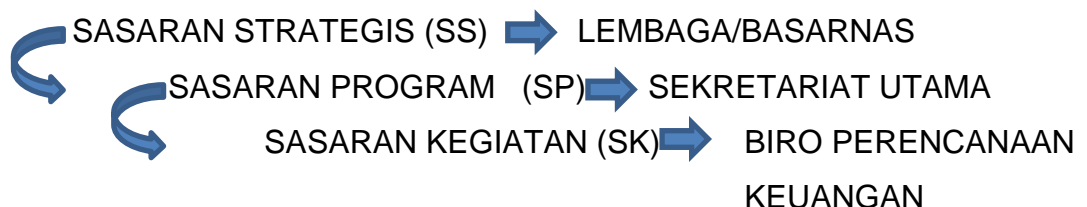
Basarnas mengembangkan ***aplikasi e-Performance***, data-data Indikator Kinerja tertuang di dalam aplikasi dan pemantauannya serta pengendaliannya dilaksanakan setiap Triwulan selama Tahun 2024.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Perjanjian Kinerja untuk pejabat dibawah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan.



Gambar 2.4 Cascading Sasaran





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siswanta, S.E.  
 Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Abdul Haris Achadi S.H., DESS.  
 Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Abdul Haris Achadi S.H., DESS.  
 Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2024  
 Pihak Pertama

Siswanta, S.E.  
 Marsekal Pertama TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100
3.	Tenujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan Peraturan PNBSP	100
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP

Pagu Anggaran Rp 106.486.766.000,-

Sekretaris Utama

Dr. Abdul Haris Achadi S.H., DESS  
 Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2024  
 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Siswanta, S.E.  
 Marsekal Pertama TNI

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja 2024

NO	KRO - RO	PAGU AWAL	BLOKIR/TRANSFER	PAGU AKHIR
I	GAJI DAN HONOR	97.569.757.000	30.342.136.000	67.227.621.000
A	Gaji dan tunjangan	96.269.397.000	29.911.960.000	66,357,437,000
B	Honor Pengelola Anggaran	1.300.360.000	430.176.000	870,184,000
II	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.323.959.000	765.550.000	2,558,409,000
III	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.130.000.000	502.645.000	1,627,355,000
IV	Layanan Manajemen Keuangan	3.463.050.000	29.438.000	3,433,612,000
<b>TOTAL</b>		<b>106.486.766.000</b>	<b>31.639.769.000</b>	<b>74.846.997.000</b>

Pada awal tahun Anggaran 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 106.486.766.000,-

- a. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp. 2.130.000.000,-
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp. 3.323.959.000,-
- c. Layanan Keuangan Rp. 3.463.050.000,-
- d. Gaji dan Tunjangan Rp. 97.569.757.000,-

Dalam Penyusunan SKP 2024 melalui e-Kinerja BKN, Dokumen PK ini dijadikan dasar penyusunan Rencana Hasil Kerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, yang kemudian diturunkan ke dalam Ketua Tim Kerja dan didistribusikan ke masing-masing anggota Tim Kerja. Realisasi Kinerja Periodik dan Final Biro Perencanaan dan Keuangan dinilai oleh Sekretaris Utama sebagai Pejabat Penilai Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, yang hasil penilaiannya ditetapkan menjadi predikat kinerja organisasi dan menjadi dasar sebaran predikat kinerja pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan.



Gambar 2.6 Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2024

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada TA 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

#### A. CAPAIAN KINERJA

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut.

Secara garis besar rata-rata capaian kinerja pada IKU Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar 179%. Pencapaian terbesar yaitu Pendapatan PNPB yang baru hasilnya diatas target yang telah direncanakan yaitu 816,58%.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pecarian dan Pertolongan	100	92,59	92,59%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	74,01	101,38%
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	88,77	93,44%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2024	Capaian (%)
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	100	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	85,46	106,8%
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,31	108,6%
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	100	816,58%	816,58%
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

## B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses analisis terhadap capaian kinerja suatu unit kerja atau instansi. Dalam hal ini capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan pencapaian suatu sasaran kinerja dari perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

### 1. Sasaran Pertama yaitu “**Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan**”

#### a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 3 indikator kinerja, yaitu Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta nilai atas evaluasi kinerja anggaran. Adapun capaian indicator untuk sasaran 1 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK.1)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	92,59%	92,59%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	74,01	101,38%
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	88,77	93,44%

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan**” didukung oleh Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pengukuran indikator ini dihitung dari rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Untuk Pencapaian Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Basarnas dilakukan pengawasan, monitoring dan kesesuaian program dan anggaran melalui pemantauan rencana aksi. Hasil penilaian capaian kinerja periodik untuk triwulan 1 s.d. 4 dan realisasi anggaran pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Program dan Anggaran

Periode	Persentase Capaian Kinerja Periodik	Persentase Realisasi Anggaran
Triwulan I	99.60%	85,97
Triwulan II	99.15%	
Triwulan III	98.61%	
Triwulan IV	99.81%	
Total	99.25%	85,97
Capaian IKU 1	92,59	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Pengendalian Kinerja dan Aktifitas Rencana Aksi UPT, Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Eksternal, serta Reviu Instrumen Penilaian Kinerja UPT (*Reward Punishment*). Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Pengendalian Kinerja dan Aktifitas Rencana Aksi UPT.  
pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk pengendalian atas capaian rencana aksi, konfirmasi data dukung langsung dari lapangan, serta diseminasi informasi terkait kinerja. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan di Kansar Mataram, Bengkulu, Lampung, Pekanbaru, Kupang, Cilacap, Tanjung Pinang, Palu, Banten, Semarang, Bandung.
- b) Penyusunan Laporan Tahunan.  
Laporan Tahunan disusun baik hard copy, maupun e-book.

c) Penyusunan Laporan dan Paparan Eksternal

dilaksanakan dalam bentuk penyampaian Laporan Kegiatan tiap Triwulan yang disampaikan ke Presiden RI, Wakil Presiden RI, Sekretaris Kabinet RI, dan Menteri PMK.

d) Instrumen Penilaian Kinerja UPT (Reward Punishment)

Telah dilaksanakan penilaian kinerja UPT untuk periode TA 2023 dan telah ditetapkan hasil penilaian UPT dari 13 kategori serta pemenang UPT dari Kelas A dan Kelas B. Pengumuman diumumkan di acara Rapat Kerja Basarnas 2024.

Dan untuk meningkatkan kualitas penilaian pada pemberian penghargaan atas kinerja UPT, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja UPT sebagai dasar pemberian penghargaan terhadap kinerja UPT di tahun anggaran 2024. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18-20 Desember 2024 bertempat di Ruang Serbaguna Dono Indarto, Gedung Basarnas lantai 15. Kegiatan tersebut diikuti oleh Tim Penilai Kinerja dan para Kasubag/Kaur Umum serta petugas penyusun laporan kinerja.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun hasil penilaian SAKIP Tahun 2024 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



**panrb**  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

---

Nomor : B/674/AA.05/2024  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

19 Desember 2024

Kepada  
Yth. **Sekretaris Utama**  
**Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**  
di  
Jakarta

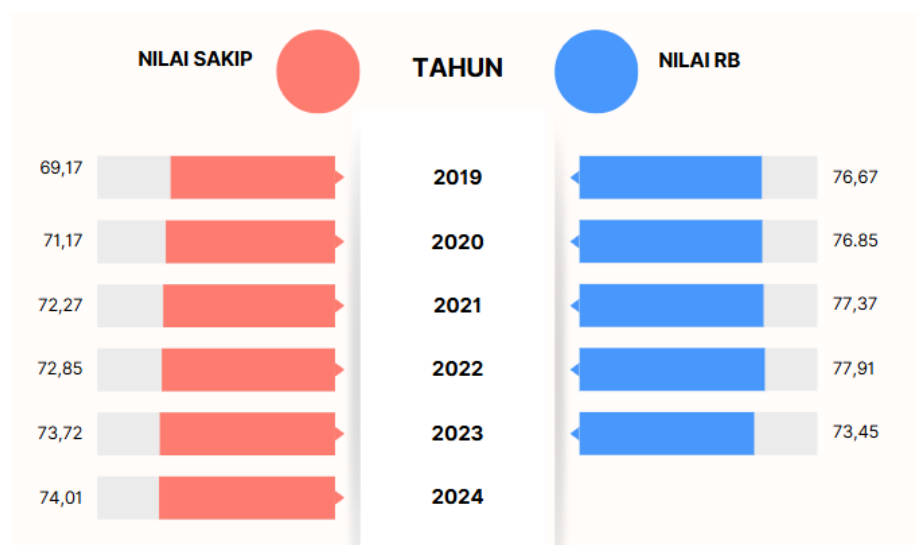
Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	23,51	23,71
2. Pengukuran Kinerja	30	21,60	22,14
3. Pelaporan Kinerja	15	10,84	10,95
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,11	17,21
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>73,06</b>	<b>74,01</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Gambar 3.1 Hasil SAKIP



Penyampaian dokumen SAKIP tepat waktu harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Dasar hukum penyusunan SAKIP yang ada di Basarnas antara lain:

- a) Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 4 Tahun 2016 tentang Implementasi Sistem SAKIP di lingkungan Badan SAR Nasional.
  - b) Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK. KBSN-231/PR.02.01/XII/BSN-2022 tentang Buku Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
  - c) Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK. KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.
  - d) Petunjuk Teknis Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peningkatan Nilai SAKIP sangat mendorong semangat Basarnas dalam usaha terus meningkatkan Kinerja melalui Manajemen Kinerja dan meningkatkan Nilai SAKIP. Berikut adalah Peningkatan Nilai SAKIP dan RB Basarnas.



Gambar 3.2. Peningkatan Nilai SAKIP dan RB

Kegiatan yang mendukung Indikator ini yaitu:

a) Asistensi Dokumen SAKIP UPT

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi SAKIP, khususnya dalam komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja melaksanakan asistensi penyusunan dokumen SAKIP UPT pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2024 dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah menyusun dan mengupload dokumen SAKIP sesuai batas waktu yang ditentukan.

Dokumen SAKIP yang disusun disampaikan ke Kementerian PANRB melalui aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)). Dokumen SAKIP meliputi Dokumen Renstra, Reviu Renstra, Reviu IKU dan Manual IKU, PK, RKT, Rencana Aksi dan Pemantauan Rencana Aksi, DPA/POK, Pohon Kinerja dan *Cascading*, Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal dan tindaklanjutnya, Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan 1, 2, 3 dan 4, Pedoman Teknis Perencanaan, Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja, serta Pedoman Evaluasi SAKIP Internal.

b) Asistensi Dokumen SAKIP Unit Eselon I, II, dan Balai Pelatihan SDM PP

Asistensi juga dilaksanakan untuk unit Eselon I, II, dan Balai Pelatihan SDM PP. Kegiatan asistensi penyusunan dokumen SAKIP Pusat dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Februari 2024.

c) Penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga, Sekretariat Utama, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Selain melakukan asistensi, Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga Sekretariat Utama, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

d) Rekapitulasi Capaian Kinerja Periodik

Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi atas realisasi rencana aksi UPT dan Unit Kerja Kantor Pusat, baik periodik maupun Final. Selanjutnya menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi tersebut kepada Pejabat Penilai Kinerja Unit Kerja untuk dilakukan penilaian dan penetapan predikat kinerja organisasi.

e) Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024.

Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Periode Renstra 2020-2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi keberhasilan sekaligus permasalahan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target pada periode Renstra 2020-2024. Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024 Kantor Pusat dan Balai Pelatihan SDMPP di Magelang dan Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan di Makassar.

3) Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran

Pengukuran indikator kinerja ini merupakan nilai capaian pada aplikasi monev-keu Kementerian Keuangan RI. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan lainnya dan menyajikan informasi-informasi terkait realisasi anggaran, keluaran, capaian indikator keluaran, serta capaian indikator sasaran. Pengisian aplikasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja, tingkat unit eselon 1 sampai dengan tingkat lembaga. Selain itu aplikasi tersebut diisi secara berkala yaitu setiap bulan. Sehingga dari aplikasi tersebut DJA Kementerian Keuangan dapat

melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dari tiap-tiap kementerian dan lembaga.

Terkait pemantauan pencapaian Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan Pemantauan terhadap seluruh UPT dan Unit Kerja di kantor Pusat, baik pemantauan di Aplikasi, melalui *Virtual Meeting* maupun monitoring langsung pada beberapa Kantor Unit Pelayanan Teknis sebagai uji petik. Hasil nilai EKA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 adalah 88.77.

The screenshot shows a web application interface for 'MONEV | KEMENKEU' with the URL 'monev.kemenkeu.go.id'. It features a search bar and a table with the following data:

No.	Kode Kementerian/Lembaga	Kementerian Lembaga	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	107	BADAN SAR NASIONAL	84,73	92,80	88,77

Below the table, it indicates 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri' and includes navigation buttons for 'Sebelumnya', '1', and 'Selanjutnya'.

Gambar 3.3 Hasil Nilai NKA

Terkait pemantauan pengisian aplikasi-aplikasi dan penyusunan Laporan laporan dalam mendukung Laporan Pusat, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan pemantauan terhadap 44 UPT dan 13 Unit Kerja di Kantor Pusat, baik pemantauan di WA Group, melalui *Luring*, *Daring* maupun monitoring langsung pada beberapa Kantor Unit Pelayanan Teknis sebagai uji petik. Memastikan bahwa seluruh aplikasi terisi dan seluruh laporan tersusun sesuai kaidah dan format peraturan yang berlaku.

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 1 (SK 1)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	92,59%	92,59%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	74,01	101,38%
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	88,77	93,44%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran “**Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan**”:

- a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan capaiannya sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%;
- b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja capaiannya sebesar 101,38%dengan realisasi sebesar 74,01 dari target 73;
- c) Capaiannya sebesar 93,44% Realisasi Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 88,77dari target 95.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
	2022	73	68,38	93,67
	2023	100%	92,59%	92,59%
	2024	100	100	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	70,3	62,51	88,91%
	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
	2022	70,5	72,86	103,35%
	2023	72	73,72	102,39
	2024	73	74,01	101,38%
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94	94,82	100,87%
	2021	94	93,8	99,79%
	2022	94	93,33	99,29%
	2023	95	95,46	100,48%
	2024	95	88,77	93,44%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan naik karena terus berupaya mendorong UPT dan Satuan Kerja terus melakukan penginputan.
- b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c) Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran capaiannya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
	2022	73	68,38	93,67%
	2023	73	100%	100%
	2024	73	100%	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
	2022	70,5	72,86	103,35%
	2023	72	73,48	102,39%
	2024	73	74,01	101,38%
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94	NA	NA
	2021	94	93,8	99,79%
	2022	94	93,33	99,29
	2023	95	95,46	100,48%
	2024	95	88,77	93,44%

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Untuk indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran **“Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan”** ada standar nasional. Untuk Nilai SAKIP dan NKA standar tinggi adalah 100.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran kinerja **“Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan”** untuk

Tahun 2024 ada yang mengalami penurunan dan kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan untuk pengisian aplikasi pemantauan kinerja yang merupakan salah satu kategori penilaian UPT, input Aplikasi aplikasi *e-Performance*, Aplikasi e-Monev Bappenas, dan e-SAKIP Revi Kementerian PANRB;
- Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasai agar kendala dalam aplikasi pemantauan kinerja anggaran/e-performance segera teratasi.
- Adanya asistensi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Kerja Kantor Pusat terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP, serta secara berkala melakukan reminder dengan petugas penyusun laporan kinerja seluruh UPT dalam rangka pengumpulan data dan percepatan entri laporan kinerja baik triwulan maupun tahunan.
- Pada Tahun 2024, Basarnas telah melaksanakan transformasi pengelolaan kinerja, yang meliputi kinerja orgainsasi dan kinerja individu. Transformasi tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan berbagai upaya efisiensi. Dari perspektif pelaksanaan kegiatan monitoring, penyusunan dokumen SAKIP, Verifikasi dan Penetapan Predikat Kinerja Organisasi Periodik dan Tahunan, serta Pelaporan-pelaporan telah dilaksanakan sesuai target Tahunan dan Triwulan,



dan realisasi juga telah mencapai target. penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan perkantoran secara optimal.
- Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi
- Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas melalui bimbingan teknis maupun belajar mandiri.

7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **“Meningkatnya Evaluasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Kinerja dan Keuangan”** adalah sebagai berikut:

- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
- Rapat Kerja Basarnas
- Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
- Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan

Program Dukungan Manajemen sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Basarnas. Aktivitas selama Tahun 2024. Berikut ini adalah aktivitas dalam program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.7 Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 1

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan I	Kegiatan di Triwulan II
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	Telah dilaksanakan Pengisian Aplikasi SMART DJA Triwulan 4 Tahun 2023.  Telah dilaksanakan Kegiatan Pengisian dan Verifikasi Pemantauan Kinerja (Aplikasi emonev bappenas dan Eperformance) Trwiulan 4 Tahun 2023 pada tanggal 23-26 januari 2024.	Telah dilaksanakan pemantauan dan verifikasi Capaian Kinerja periodik Triwulan 1 Tahun 2024 untuk UPT, Unit Eselon 2 dan Eselon 1
Rapat Kerja Basarnas	Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja Basarnas Tahun 2024 pada tanggal 5-7 Februari 2024.	Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja Basarnas Tahun 2024 pada tanggal 5-7 Februari 2024. (Pada Triwulan I)

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan 2024

Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	Telah dilaksanakan penyusunan, Laporan Kegiatan ke Presiden Tw 4 Tahun 2023,  Telah dilaksanakan penginputan data pada Aplikasi SMART DJA Tw 1 Tahun 2023	Telah dilaksanakan kegiatan pengisian, verifikasi dan pemantauan evaluasi kinerja anggaran Triwulan 2 Tahun 2024 di Belitung  Penyusunan Laporan Tahunan 2024. Percetakan Laporan Tahunan dan didistribusikan ke UPT dan Unit Kerja Kantor Pusat
Penyusunan Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja	Telah dilaksanakan asistensi penyusunan dokumen SAKIP UPT pada tanggal 19-21 Februari 2024 dengan narasumber dari KemenpanRB  Telah dilaksanakan asistensi penyusunan dokumen SAKIP Pusat pada tanggal 22-24 Februari 2024.  Telah dilaksanakan penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga, Sekretariat Utama dan Biro Renkeu.	Telah dilaksanakan penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga, Sekretariat Utama dan Biro Renkeu pada Triwulan I

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan III	Kegiatan di Triwulan IV
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	Telah pemantauan terhadap 45 Satker melalui aplikasi SMART DJA dan EMONEV Bappenas Triwulan 3 Tahun 2023.  Telah dilaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan di Kansar Padang dan Kansar Medan	Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan T.A. 2024 dan Pemantauan Capaian Kinerja UPT pada beberapa Kantor Pencarian dan Pertolongan.
Rapat Kerja Basarnas	Rapat Kerja Basarnas Tahun 2024 telah dilaksanakan di Triwulan 1 Tahun 2024	telah dilaksanakan di Triwulan I dengan menghadirkan Narasumber yaitu Menteri PANRB dan Deputi Bappenas
Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024 Kantor Pusat dan Balai Pelatihan SDM di Magelang. Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja periode Renstra 2020-2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan di Makassar	Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Kepada Presiden RI Periode Oktober – Desember 2024
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Dokumen SAKIP telah selesai di Triwulan 1 Tahun 2024	Kegiatan Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Periodik TW III tahun 2024 unit Kerja Kantor Pusat Evaluasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Periodik dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja UPT Anggaran Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Oktober 2023 di Denpasar dan Penyusunan LAKIP Periodik di lingkungan Sestama tgl 29 November - 1 Desember 2024

## 2. Sasaran Kedua yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga”

### a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA, Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program, Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	<5%	<5%	100%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung sasaran di atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Rencana dan Program beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Beberapa penyebab anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangai akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelaahan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal. Tujuan dari pengukuran indikator ini yaitu Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menerapkan peraturan terkait pengusulan anggaran unit kerja dan UPT antara lain berupa kelengkapan data dukung dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengusulan anggaran.

- 2) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program Penyusunan RKA-KL dimulai dengan penyusunan Pagu Kebutuhan, yang merupakan penggambaran kebutuhan anggaran dari masing-masing UPT dan digabungkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan mengacu pada Renstra dan RKP. Kemudian dilanjutkan dengan Pagu Indikatif yang merupakan indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang.

Selanjutnya disusun Pagu Anggaran yang merupakan rincian anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Sebelum dikeluarkan Pagu Alokasi Anggaran maka dilakukan Trilateral Meeting kedua untuk memastikan anggaran yang diberikan mempunyai komposisi yang pas dalam membiayai kegiatan pemerintah. Pagu Alokasi Anggaran merupakan kegiatan akhir dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL). Pagu Alokasi

Anggaran merupakan acuan dalam penyusunan APBN di tahun yang akan datang.

KRISNA merupakan singkatan dari “Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran”. Sistem Informasi Krisna digunakan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja. Saat ini Krisna memiliki 10 sub sistem di dalamnya, termasuk Krisna-Renja K/L yang digunakan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) K/L.

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) K/L serta disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja K/L memuat substansi :

- Visi dan Misi;
- Sasaran : Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan;
- Program : Program Spesifik/ Program Lintas;
- Kegiatan : Kegiatan Spesifik/ Kegiatan Lintas;
- Output : KRO dan RO;
- Lokasi;
- Komponen dan Indikasi Pendanaan.

Tahapan penyusunan Renja K/L :

- Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L;
- Penyusunan Rancangan Renja K/L;
- Pemutakhiran Rancangan Renja K/L.

Melalui Sistem Informasi Krisna, Renja K/L disusun dan ditelaah serta menjadi referensi dalam proses penyusunan dokumen RKA-K/L.

Proses penyusunannya terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- Penyusunan RKA-K/L Pagu Kebutuhan;
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif;

- Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran; dan
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran

Untuk Pencapaian Indikator “Persentase Ketepatan Waktu Pada Seluruh Unit Kerja dan UPT” dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program dilihat seberapa besar keterlambatan yang dilakukan oleh UPT dan Unit Kerja Kantor Pusat, mengingat penyusunan DIPA di tahun yang akan datang dilalui oleh proses yang cukup panjang dan proses keterlambatan tersebut akan menyebabkan efek domino yang panjang. Sampai dengan Triwulan IV, seluruh Satuan Kerja wajib menyerahkan Pagu Indikatif untuk diinput di aplikasi oleh Substansi Rencana Program.

Tabel 3.9 Jumlah Satker yang tepat waktu pengumpulan data

Satker	Jumlah	Satker tepat Waktu	Persentase
UPT	44	44	100%
Unit Kerja Kantor Pusat	13	13	100%

Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program. Penyusunan RKA-KL dimulai dengan penyusunan Pagu Kebutuhan, yang merupakan penggambaran kebutuhan anggaran dari masing-masing UPT dan digabungkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan mengacu pada Renstra dan RKP. Kemudian dilanjutkan dengan Pagu Indikatif yang merupakan indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang.

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.10 Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	<5%	<5%	100%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga” telah mencapai targetnya.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	<5%	<5%	100%
	2021	<5%	<5%	100%
	2022	<5%	<5%	100%
	2023	<5%	<5%	100%
	2024	<5%	<5%	100%
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga”:

- a) Capaian Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA pada Tahun 2024 sesuai target.

Artinya kelengkapan administrasi pengajuan anggaran telah dilaksanakan lengkap administrasi

- b) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program target tercapai baik Tahun 2024 maupun tahun sebelumnya.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	<5%	<5%	100%
	2021	<5%	<5%	100%
	2022	<5%	<5%	100%
	2023	<5%	<5%	100%
	2024	<5%	<5%	100%
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga” tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga” untuk Tahun 2024 relatif realisasinya memenuhi target. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
- dilaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengajuan RKA-KL



- dilaksanakan sosialisasi terkait pengisian aplikasi RKA-KL
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
  - Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment di Basarnas.
  - Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.
  - Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
  - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.
- 7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lembaga” adalah sebagai berikut:
- Telah dilaksanakan penyusunan laporan analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Deviasi Halaman III DIPA triwulanan
  - Penyusunan RKA-KL Basarnas
  - Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas
- Koordinasi perencanaan Basarnas dilaksanakan kepada Unit Kerja internal di lingkungan Basarnas dengan *stakeholder* dan Potensi SAR seperti Kementerian, Lembaga, TNI-Polri, Pemerintahan Daerah, dan masyarakat dan dengan Lembaga Legislatif yaitu Komisi V DPR-RI. Kegiatan ini sangat penting untuk mencatat usulan, saran dan masukan bagi Basarnas yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan peningkatan rencana kerja di waktu yang akan datang.

Tabel 3.13 Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 2

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan I	Kegiatan di Triwulan II
Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan aparatur perencanaan tanggal 22-24 Jan di Yogyakarta. Telah dilaksanakan kunjungan kerja DPR RI ke Yogyakarta tanggal 1-12 Maret	Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan berangkat dari tanggal 4 s.d. 5 April 2024
Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	Persiapan proses penyusunan KAK	Akan dilaksanakan pencairan Termin 1 Kegiatan Penyusunan Renstra Basarnas Tahun 2025-2029 oleh PT. Arofasa Victorindo pada tanggal 10 Juli 2024
Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	-	Telah dilaksanakan Penyusunan Rancangan Krisna-Renja Basarnas TA 2025 pada Tanggal 27-31 Mei 2024 di Jakarta  Sinkronisasi Renja K/L - RKA K/L TA 2024 untuk Pelaporan TW I pada tanggal 18 s.d. 22 April 2024, Sinkronisasi Renja K/L - RKA K/L TA 2024 untuk Pelaporan TW I pada tanggal 21 s.d. 25 April 2024 Trilateral Meeting Pagu Indikatif TA 2025 dengan Mitra Bappenas di Yogyakarta pada tanggal 20 s.d. 22 Mei 2024, Finalisasi Penyusunan Berita Acara Trilateral Meeting Pagu Indikatif TA 2025 pada tanggal 6 s.d. 8 Juni 2024 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung
Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	Terkena Pemotongan Anggaran	Terkena Pemotongan Anggaran

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan III	Kegiatan di Triwulan IV
Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan Rapat dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 perihal Evaluasi APBN 2024 s/d Agustus dan LKPP TA 2023 dan Persiapan Materi RDP Komisi V DPR RI dan RKA KL 2025 dalam Nota Keuangan RAPBN 2025.</li> <li>- Telah dilaksanakan Rapat dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 9 September 2024 perihal Alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L.</li> <li>- Telah dilaksanakan kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas Semester II Tahun 2024</li> <li>- Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI</li> </ul>

Kegiatan yang Mendukung Sasaran dan Indikator 1	Kegiatan di Triwulan III	Kegiatan di Triwulan IV
Rancangan Teknokratik Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	Telah dilaksanakan pencairan Termin 1 Kegiatan Penyusunan Renstra Basarnas Tahun 2025-2029 oleh PT. Arofasa Victorindo pada tanggal 10 Juli 2024. Termin 2 direncanakan tanggal 20 Desember 2024	Telah selesai dilaksanakan
Penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL	Telah dilaksanakan Penyusunan Rancangan Krisna-Renja Basarnas TA 2025 pada Tanggal 27-31 Mei 2024 di Jakarta	Kegiatan Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kantor Pusat 1. Telah dilaksanakan kegiatan Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025. 2. Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025. 3. Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 4. Sinkronisasi Renja-RKA dan Finalisasi RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2025
Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	Terkena Pemotongan Anggaran	Terkena Pemotongan Anggaran

### Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

Basarnas mengusulkan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri berupa Rigid Buoyancu Boat (RBB) dalam DRPPLN/Green Book Tahun 2023. Basarnas telah mengirimkan kriteria kesiapan RBB ke Kementerian PPN/Bappenas sebagai bahan pertimbangan. Rapat mengenai usulan Basarnas tersebut telah dilaksanakan secara intens. Saat ini, kami masih menunggu keluarnya Daftar Kegiatan (DK) dari Bappenas. DK tersebut akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR (DJPPR) kementerian Keuangan untuk proses penetapan Sumber Pembiayaan (SP).

### 3. Sasaran ketiga yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel”**

#### a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP, Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN, Opini BPK RI atas

Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Adapun capaian indikator untuk sasaran 1 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	85,46	106,8%
	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,31	108,6%
	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB	100	816,58%	816,58%
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel**” didukung oleh Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP

Target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 80% sedangkan realisasi 85,46%, sehingga capaian kinerja sebesar 106,8%. Capaian indikator kinerja Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil audit APIP, dilakukan dengan metode penatausahaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI untuk dikumpulkan dan didokumentasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Berkas tindak lanjut beserta bukti-bukti pendukungnya ditatausahakan dan disimpan.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP atas Laporan Keuangan Basarnas sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2022 atas 13 LHP dengan 138 temuan pemeriksaan senilai dengan

406 rekomendasi, menunjukkan status tindak lanjut yang telah dilaksanakan Basarnas adalah sebagai berikut:

**BAB II**  
**IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT**  
**PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA**

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2023, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Basarnas sampai dengan tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Basarnas.

Pemantauan atas tindak lanjut Basarnas terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

**Tabel 88. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Basarnas Posisi s.d. Semester II TA 2022**

No.	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Tahun 2023	24	90	47	36	7	0
2	Tahun 2022	11	36	29	7	0	0
3	Tahun 2021	3	15	13	2	0	0
4	Tahun 2020	7	38	35	3	0	0
5	Tahun 2019	8	31	31	0	0	0
6	Tahun 2018	12	32	32	0	0	0
7	Tahun 2017	9	28	27	1	0	0
8	Tahun 2016	17	47	46	0	0	1
9	Tahun 2015	10	21	21	0	0	0
10	Tahun 2014	11	20	20	0	0	0
11	Tahun 2013	7	11	10	0	0	1
12	Tahun 2012	8	18	17	1	0	0
13	Tahun 2011	11	19	19	0	0	0
	Jumlah	138	406	347	50	7	2

Sumber: Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Pada Tahun 2023, Basarnas telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

1. Pengembalian ke Kas Negara menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp 3.301.347.044,91.
2. Penatausahaan pemanfaatan GPS *Tracking*.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:

1. Pelaksanaan inventarisasi aset tetap.
2. Pengkajian pembayaran uang lembur untuk kegiatan siaga rutin sesuai dengan PMK.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

2) Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Nilai IKPA merupakan hasil konsolidasi dari 46 satker di lingkungan Basarnas. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dapat dipantau melalui Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN). Pelaksanaan Anggaran terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berikut merupakan hasil monitoring dan evaluasi dari masing-masing aspek pengukuran beserta langkah langkah meningkatkan Nilai IKPA. Hasil penilaian IKPA Tahun 2024 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dilihat di bawah ini.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%	No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%	No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Revisi DIPA (10%)	1.	Penyerapan Anggaran (20%)	1.	Capaian Output 25%
2.	Deviiasi Halaman III DIPA (10%)	2.	Data Kontrak (10%)		
		3.	Penyelesaian Tagihan (10%)		
		4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)		
		5.	Dispensasi SPM (5%)		

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER

CARI DI HALAMAN: Q

NO	KODE KL	NAMA KL	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL x KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYEMPAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT	Nilai Aspek				
1	107	BADAN NASIONAL PENCIARAN DAN PERTOLONGAN (BAGARIAS)	Nilai	100.00	80.26	88.45	97.08	99.46	96.93	94.94	92.81	100%	0.50	92.31	
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
			Nilai Akhir	10.00	12.04	17.69	9.71	9.95	9.69	23.74					
			Nilai Aspek		90.13			95.48		94.94					

Gambar 3.4. Nilai IKPA

Langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi kinerja RPD antara lain:

- Melakukan reuiu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
- Mengidentifikasi dan menghitung target nominal penyerapan anggaran triwulan berkenaan;
- Mengutamakan RPD atas sisa pagu anggaran neto/efektif (mengesampingkan pagu blokir);
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan RPD untuk belanja kontraktual, termasuk rencana pembayaran kontrak yang akan jatuh tempo;
- Menyusun RPD untuk belanja-belanja operasional yang bersifat rutin (kegiatan regular);
- Menyusun RPD atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berkenaan dan;

- Mengeksekusi kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terhadap kegiatan yang belum pasti jadwal pelaksanaannya, hendaknya, rencana penarikan dana di letakkan pada bulan-bulan akhir tahun anggaran sehingga tidak mempengaruhi target penyerapan anggaran

Langkah-langkah strategis untuk melakukan optimalisasi pencapaian indikator penyerapan anggaran antara lain yaitu :

- Memperbaiki perencanaan dan mengeksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun

Langkah optimalisasi pengelolaan UP dan TUP diantaranya:

- Menghitung dengan cermat kebutuhan UP secara rasional, perhatikan pola realisasi belanja pada bulan-bulan sebelumnya untuk UP, dan kebutuhan mendesak untuk TUP.
- Mengidentifikasi kemampuan dalam merevolving UP serta mempertanggungjawabkan TUP.
- Jika UP terlalu besar yang membuat frekuensi revolving semakin panjang maka perlu dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah outstanding UP.
- Dibutuhkan pengendalian yang baik atas UP-TUP termasuk dengan segera mempertanggungjawabkan penggunaan UP-TUP kepada KPPN tepat waktu.
- Mengoptimalkan pembayaran dengan mekanisme Langsung (LS), dana PNBPN, dan/atau penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Nilai indikator kinerja dispensasi SPM sampai bulan Juni 2024 adalah 100. Satker perlu menjaga nilai tersebut sampai dengan akhir tahun dengan melakukan langkah-langkah berikut:

- Memonitor progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menyiapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.
- Penyampaian SPM hendaknya tidak melewati batas-batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.
- Meningkatkan konsolidasi internal dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan-tagihan tepat waktu.
- Koordinasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb apabila mengalami kendala teknis dalam pelaksanaan anggaran di lapangan.

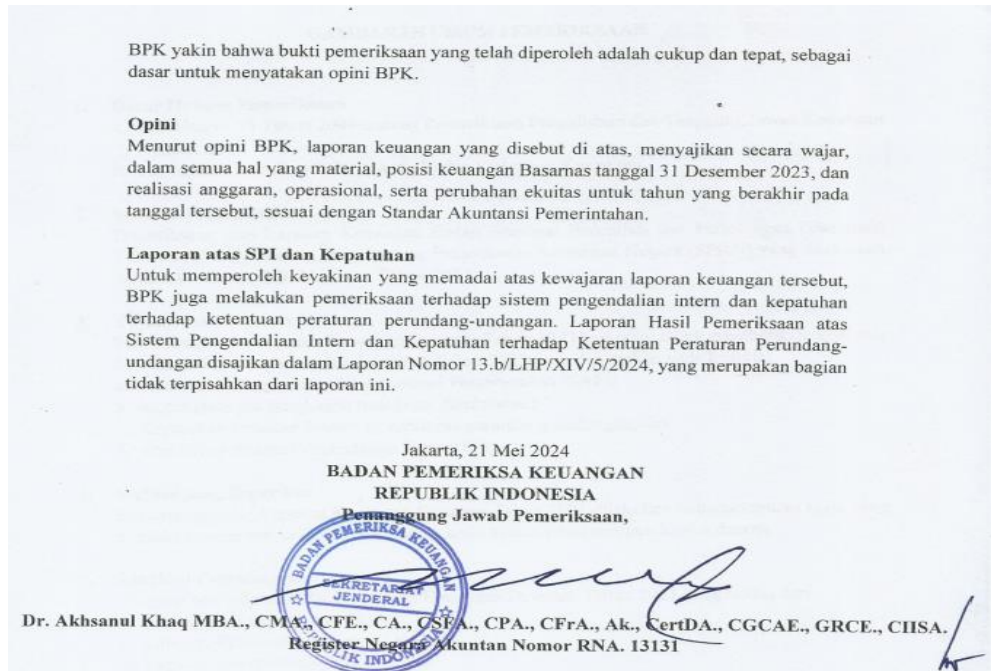
3) Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB

Dalam hal pelaksanaan anggaran telah dilakukan berbagai perbaikan untuk tetap menjaga capaian realisasi PNB, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Target PNB Basarnas 1,255,400,000 realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp 410,251,304,439 atau sebesar 816%, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan penyelesaian revisi anggaran sesuai dengan tingkat kewenangan baik DIPA Pusat maupun UPT.

Selain itu juga dilakukan Penyusunan Laporan Keuangan dengan konsolidasi seluruh satker ke tingkat Lembaga. Dan akan Menyusun PMK dan mengusulkan izin penggunaan tentang jenis dan tarif atas PNB yang bersifat Volatil atas pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan pada Basarnas.



4) Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Gambar 3.5 Nilai Opini BPK

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.15 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	85,46	106,8%
	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,56	108,89%
	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB	100	816,58%	816,58%
	Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

- d) Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP telah ditindaklanjuti sampai 85,46%, sehingga capaian menjadi 106,8%
- e) Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari target 85 mendapat angka 92,31, sehingga capaian menjadi 108,6%.
- f) Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN mencapai 816,58%.
- g) Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapatkan predikat WTP.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	2020	50%	91,32%	182,64
	2021	65%	83,02%	127,72
	2022	70%	94,30%	134,71
	2023	85%	94%	117,5%
	2024	80	85,46	106,8%
Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	80	89,54	111,93
	2021	80	90,82	113,53
	2022	80	91,8	114,75
	2023	85	92,56	108,89%
	2024	85	92,31	108,6%
Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	2020	NA	NA	NA
	2021	NA	NA	NA
	2022	85%	100%	117,65
	2023	100	643%	643%
	2024	100	816,58%	816,58%
Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	WTP	WTP	100%
	2021	WTP	WTP	100%
	2022	WTP	WTP	100%
	2023	WTP	WTP	100%
	2024	WTP	WTP	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran “Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel” jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	2020	50%	91,32%	182,64
	2021	65%	83,02%	127,72
	2022	70%	94,30%	134,71
	2023	85%	94%	117,5%
	2024	80	85,46	106,8%
Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	80	89,54	111,93
	2021	80	90,82	113,53
	2022	80	91,8	114,75
	2023	85	92,56	108,89%
	2024	85	92,31	108,6%
Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	2020	NA	NA	NA
	2021	NA	NA	NA
	2022	85%	100%	117,65
	2023	100	643%	643%
	2024	100	816,58%	816,58%
Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	WTP	WTP	100%
	2021	WTP	WTP	100%
	2022	WTP	WTP	100%
	2023	WTP	WTP	100%
	2024	WTP	WTP	100%

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran “Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel” ada standar

nasional yaitu untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Basarnas yaitu WTP.

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan  
Pencapaian sasaran kinerja **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel**” di Tahun 2024 mengalami peningkatan, Berikut penyebab keberhasilan/kegagalan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk sasaran tersebut:
  - a) Target PNBPN tahun 2023 yaitu sebesar 1.439.855.442 dan realisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar 8.070.775.409 atau sebesar 643%, dibandingkan dengan Target PNBPN Basarnas 1,255,400,000 realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 410,251,304,439 atau sebesar 816% hal ini disebabkan oleh cukupnya pemahaman dan sosialisasi terhadap PMK Volatil PNBPN dilingkungan Basarnas.
  - b) Kendala yang dihadapi Basarnas dalam melaksanakan rekomendasi BPK antara lain kesulitan dalam koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait proses permohonan alih status tanah dan bangunan Kantor Pusat Basarnas yang masih belum ada jawaban serta pengurusan penerbitan IMB bangunan lama. BPK RI merekomendasikan agar Basarnas untuk menginventarisasi dan mengambil langkah strategis untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang belum selesai, sertameningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  
Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Persentase implementasi pengelolaan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, antara lain:
  - a) Keterbatasan verifikator keuangan di Bagian Perbendaharaan;

- b) Beban kerja yang cukup banyak terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja pada Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Basarnas;
  - c) Penyampaian LPJK dari UPT belum tepat waktu;
  - d) Sekretaris PPK Kantor Pusat Basarnas belum melaksanakan verifikasi secara teliti;
  - e) Belum ada SOP tentang verifikasi LPJK
- 7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel”** adalah sebagai berikut:
- Program Dukungan Manajemen sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Aktivitas selama Tahun 2024. Berikut aktivitas dalam Program Dukungan Manajemen di bagian Keuangan

Tabel 3.18. Kegiatan dan Aktivitas dalam mendukung Sasaran 3

Indikator	Kegiatan Pendukung Sasaran dan Indikator	Keterangan Capaian Upaya Pendukung Sasaran
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	Perencanaan/Implementasi SAP berupa Belanja Honor Operasional Satuan Kerja belum dapat teralisasi sampai dengan Triwulan III karena ada Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Honorarium Kelompok Kerja UAKPA, UAPPA-E1 dan UAPA
Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Kegiatan masuk dalam Automatic Adjustment
	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 tingkat Satker, Eselon I dan Kementerian/Lembaga telah mengacu pada Standar Akuntansi. Pemerintahan (SAP) dan jadwal penyampaian Laporan Keuangan ke Menteri Keuangan tepat waktu.
	Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	Melakukan pemantapan Sistem Akuntansi Instansi (SAK) pada Satuan Kerja Palangkaraya dan Tanjungpinang dalam rangka peningkatan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2024.

Indikator	Kegiatan Pendukung Sasaran dan Indikator	Keterangan Capaian Upaya Pendukung Sasaran
	Pendampingan Tim Pemeriksa	Melaksanakan kegiatan Pendampingan dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas TA 2023 telah selesai dilaksanakan pada Semester II
	Peningkatan Kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan melalui penguatan pemahaman akan kenadalan informasi laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan
	Publikasi Laporan Keuangan	Kegiatan masuk dalam Automatic Adjustment
	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 terkait dengan tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan.
Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB	Penyusunan Jenis dan tarif PNB	Melaksanakan PNB yang bersifat Volatil atas pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan dan Evaluasi Revisi Anggaran	1. Menyelesaikan revisi anggaran sesuai dengan tingkat kewenangan baik DIPA Pusat maupun UPT 2. Pelaksanaan SOP Revisi dalam mencapai instrumen indikator IKPA
	Peningkatan Kompetensi Anggaran	Mengikuti e learning dan diklat
	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran	terlaksananya kunjungan ke satker terkait penyampaian informasi pengelolaan anggaran, perubahan kebijakan, keberhasilan, kesulitan maupun langkah-langkah yang telah dilakukan selama tahun berjalan.
	Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	Melaksanakan kegiatan rutin Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran
	Pembekalan Pengelola Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran
	Monitoring Bendahara Pengeluaran (Uji Petik)	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNB

Indikator	Kegiatan Pendukung Sasaran dan Indikator	Keterangan Capaian Upaya Pendukung Sasaran
	Pengelolaan PNBP	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNBP
	Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Rekening Pengeluaran Lingkup Basarnas
	Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan	Melaksanakan kegiatan Pengelola Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan
	Layanan Perkantoran	gaji,tunjangan dan honor
	Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kantor Pusat

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun Anggaran 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan Pagu awal sebesar Rp. 106.486.766.000,-

- a. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp. 2.130.000.000,-
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp. 3.323.959.000,-
- c. Layanan Keuangan Rp. 3.463.050.000,-
- d. Gaji dan Tunjangan Rp. 97.569.757.000,-

Berikut adalah table Realisasi Pelayanan KRO dan detail Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja

Table 3.19 Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	KRO - RO	PAGU AWAL	BLOKIR/TRANSFER	PAGU AKHIR
I	GAJI DAN HONOR	97.569.757.000	30.342.136.000	67.227.621.000
A	Gaji dan tunjangan	96.269.397.000	29.911.960.000	66.357.437,000
B	Honor Pengelola Anggaran	1.300.360.000	430.176.000	870,184,000
II	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.323.959.000	765.550.000	2,558,409,000
III	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.130.000.000	502.645.000	1,627,355,000
IV	Layanan Manajemen Keuangan	3.463.050.000	29.438.000	3,433,612,000
<b>TOTAL</b>		<b>106.486.766.000</b>	<b>31.639.769.000</b>	<b>74.846.997.000</b>

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Per Kegiatan / Aktivitas dalam Rencana Aksi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2024	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2024	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALISASI	%
1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pecarian dan Pertolongan	100%	100%	Penyusunan Laporan Tahunan	1 dok	75.670.000	53,824,000	53,823,350	100%
					Penyusunan Laporan-laporan dan Paparan-paparan Eksternal	1 dok	21.000.000	21.000.000	20,896,860	99,51%
					Instrumen Penilaian Kinerja UPT (Reward Punishment)	1 dok	33.615.000	136,507,000	136,507,000	100%
					Pengendalian Kinerja dan Aktivitas Rencana Aksi UPT	1 dok	697.323.000	345,283,000	345,007,611	99,92%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	74,01	Asistensi Dokumen SAKIP UPT	1 dok	280.526.000	177,492,000	177.391.600	99,94%	
				Asistensi Dokumen SAKIP Unit Eselon I , II dan Balai Diklat	1 dok	99.566.000	94,836,000	94.824.420	99,99%	
				Penyusunan Dokumen SAKIP Lembaga, Sekretariat Utama dan Biro RenKeu	1 dok	39.500.000	261,234,000	260,978,450	99,90%	
				Review Indikator dan Manual IKU	1 dok	81.241.000	15,461,000	15,423,000	99,75%	
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 4 dan Tahunan	1 dok	43.245.000	3,770,000	3,770,000	100%	
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 1	1 dok	43.245.000	1,200,000	1,125,000	93,75%	
				Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 2	1 dok	43.245.000	15,376,000	15,348,615	99,82%	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2024	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2024	TRG RO	ANGGARAN					
							AWAL	REV	REALISASI	%		
					Rekapitulasi Laporan Capaian Periodik Triwulan 3	1 dok	43.245.000	15,376,000	15,351,647	99,84%		
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	88,77	Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW I	1 dok	158.161.000	222,509,000	222,473,848	99,98%		
							Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW II	1 dok	116.236.000	117,231,000	116,878,820	99,70
							Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW III	1 dok	175.716.000	0	0	0
							Pengisian dan Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja TW IV	1 dok	178.466.000	146,256,000	146.250.375	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	Penyusunan lap. analisa IKPA pada aspek kualitas perencanaan anggaran, indikator Dev. Hal. III DIPA	1 dok	367.598.000	0	0	0		
						Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	1 dok	687.542.000	323,398,000	322,838,724	99,83%	
						Penyusunan Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	1 dok	847.450.000	814,075,000	813,796,500	99,97%	
						Penyusunan Rancangan Krisna-Renja Basarnas TA 2025	1 dok	53.091.000	53.091.000	52,611,000	99,10%	
						Penyusunan Krisna-Renja Basarnas TA 2025	1 dok	47.050.000	22,836,000	22,756,800	99,65%	
						Pemutakhiran Krisna-Renja Basarnas TA 2025	1 dok	49.550.000	0	0	0	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2024	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2024	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALISASI	%
					Pembinaan Aparatur Perencanaan	1 dok	205.312.000	190,580,000	190,452,165	99,93%
					Peningkatan Kompetensi Perencanaan	1 dok	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100%
					Penyusunan Krisna-Renstra Basarnas Tahun 2025-2029	1 dok	52.550.000	52.550.000	52.550.000	100%
					Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	1 dok	262.606.000	0	0	0
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-KL) Pagu Kebutuhan TA 2025	1 dok	370.044.000	308,012,000	307,645,564	99,88%
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Indikatif TA 2025				1 dok	208.480.000	279,740,000	278,426,271	99,53%	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025				1 dok	112.686.000	117,686,000	117,362,084	99,72%	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) Pagu Anggaran TA 2025				1 dok	367.598.000	396,441,000	394,302,253	99,46	
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	85,46	Publikasi Laporan keuangan	1 dok	52.048.000	0	0	0
					Penyusunan laporan keuangan	1 dok	250.000.000	148,994,000	148,918,182	99,95%
					Rekonsiliasi laporan keuangan	1 dok	70.000.000	122,048,000	114,031,180	93,43%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2024	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2024	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALISASI	%
					konsolidasi laporan keuangan	1 dok	56.000.000	56,000,000	55,376,970	98,89%
					Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	111.000.000	236,579,000	236,578,006	100%
					Monitoring pelaksanaan dan pelaporan keuangan	1 dok	378.187.000	376,920,000	376,695,583	100%
					Peningkatan kompetensi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	49.500.000	45,726,000	45,725,932	100%
					Reviu Laporan Keuangan	1 dok	115.000.000	51,816,000	51,815,600	100%
					Telaah Laporan keuangan	1 dok	45.000.000	45.000.000	44,813,670	99,59
					Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dok	49.700.000	49,245,000	48,938,800	99,38%
	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		85	92,31	Pengelolaan dan evaluasi revisi anggaran	1 dok	250.000.000	251,566,000	251,562,549	100%
Koordinasi Pelaksanaan Anggaran					1 dok	450.000.000	382,280,000	381,693,763	99,85%	
Evaluasi Implementasi Kebijakan/Peraturan dan Pengembangan Data Tematik di Bidang Penganggaran di Basarnas					1 dok	80.000.000	85,620,000	85,619,580	100%	
Evaluasi Kinerja Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran K/L (IKPA)					1 dok	80.000.000	57,501,000	57.500.575	100%	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TRG PK 2024	REALSASI	KEGIATAN / AKTIVITAS PENDUKUNG IKU birorenkeu 2024	TRG RO	ANGGARAN			
							AWAL	REV	REALISASI	%
					Peningkatan Kompetensi Anggaran	1 dok	50.000.000	35,940,000	35,925,400	99,96%
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBPN	100	816,58%	Perencanaan dan Penyusunan atas Jenis dan Tarif PNBPN	1 dok	85.380.000	49,479,000	49,473,000	99,99%
					Koordinasi dan evaluasi Pengelolaan Penggunaan PMK. Volatil PNBPN Basarnas	1 dok	100.000.000	186,800,000	184,866,000	98,96%
					Sosialisasi Pengelolaan PNBPN 2024	1 dok	100.000.000	134,716,000	134,704,710	99,99%
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	Perencanaan/ Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	1 dok	81.000.000	81.000.000	81,000,000	100%
					Laporan Hasil Pemeriksaan	1 dok	50.000.000	0	0	0

#### D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

##### 1. Penghargaan dan Capaian Kinerja lainnya

Berikut penghargaan dan capaian kinerja lainnya yang berada dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan selama Tahun 2024.

- a. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPP) Basarnas adalah 95,11 dr Kementerian Bappenas Tahun 2024.
- b. Peringat III Implementasi JF APK APBN dan JF PK APBN pada Kementerian Negara/ Lembaga dengan jumlah Setket Menengah Kecil Tahun 2024;
- c. Penghargaan satuan kerja Terbaik pengelolaan UP/TUP Semester I Mitra KPPN Jakarta IVOpini BPK 12 kali berturut turut mendapatkan Predikat WTP
- d. Nilai IKPA adalah 92,31.
- e. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (NKA) 88,77.
- f. Dari kementerian PAN RB Nilai Sakip yang pada Tahun 2023 naik menjadi 74,01 (BB)
- g. Telah disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- h. Penetapan Kinerja Organisasi Periodik Triwulan I mendapatkan Predikat Organisasi Baik;
- i. Penetapan Kinerja Organisasi Periodik Triwulan II mendapatkan Predikat Organisasi Baik;
- j. Penetapan Kinerja Organisasi Periodik Triwulan III mendapatkan Predikat Organisasi Istimewa;
- k. Penetapan Kinerja Organisasi Periodik Triwulan IV mendapatkan Predikat Organisasi Istimewa;
- l. Penetapan Kinerja Organisasi Final Tahun 2024 mendapatkan Predikat Organisasi Istimewa;

2. Pemberian Penghargaan atas Kinerja UPT TA.2024

Sebagai tindak lanjut evaluasi instrumen penilaian kinerja UPT. Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinasikan pemberian penghargaan atas kinerja UPT sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam mendukung tujuan dan sasaran Basarnas. Penghargaan diberikan kepada UPT yang telah dinilai oleh 13 Unit Kerja Kantor Pusat sesuai kategori bidang tugas masing-masing. Dari hasil penilaian tersebut ditetapkanlah UPT Kelas A dan B yang memperoleh penghargaan pada masing-masing kategori, serta UPT Kelas A dan B Terbaik dari yang memperoleh total nilai tertinggi.

Adapun Penerima Penghargaan per Kategori adalah sebagai berikut:

- a. Kategori Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo
- b. Kategori Ketepatan Pelaporan dan Tertib Administrasi diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang
- c. Kategori Pengelolaan Kepegawaian diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna
- d. Kategori Bidang Pusat Data dan Informasi diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere
- e. Kategori Hasil Pengawasan Intern diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Gorontalo
- f. Kategori Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mamuju
- g. Kategori Bidang Operasi SAR diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta

- h. Kategori Bidang Kesiapsiagaan diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta
- i. Kategori Keandalan Sarana dan Prasarana diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta
- j. Kategori Kesiapan Sumber Daya Komunikasi diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke
- k. Kategori Pembinaan Uji Periodik Pranata Pencarian dan Pertolongan diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mamuju
- l. Kategori Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan diraih oleh:
  - 1) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya, dan
  - 2) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang

Selain itu ditetapkan UPT Kelas A dan Kelas B Terbaik yang memperoleh nilai total tertinggi dari 13 Kategori Bidang Tugas serta penilaian atas upaya untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu UPT Terbaik Kelas A adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar dengan total nilai: 84.58, sedangkan UPT Terbaik Kelas B adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap dengan total nilai 85,68.

### 3. Transformasi Pengelolaan Kinerja

Pada Tahun 2024, Basarnas telah melaksanakan transformasi pengelolaan kinerja, yang meliputi kinerja organisasi dan kinerja individu. Biro Perencanaan dan Keuangan berkolaborasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana menyusun regulasi turunan dari Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ke dalam Peraturan Kepala Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam peraturan tersebut diatur pengelolaan kinerja secara menyeluruh dan berjenjang serta saling terkait dari tingkat lembaga, eselon I, eselon II sampai dengan individu.

Berikut tata cara pengelolaan kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

- a. Perencanaan Kinerja
  - 1) Perjanjian Kinerja
  - 2) Rencana Aksi
  - 3) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- b. Evaluasi Kinerja
  - 1) Pengukuran Kinerja Organisasi
  - 2) Penetapan Predikat Kinerja Organisasi
  - 3) Penetapan Pola Distribusi Predikat Kinerja Pegawai
  - 4) Penetapan Predikat Kinerja Pegawai
- c. Pelaporan Kinerja
  - 1) Pelaporan Kinerja Periodik Organisasi
  - 2) Pelaporan Kinerja Tahunan Organisasi
  - 3) Pelaporan Kinerja Individu
  - 4) Evaluasi SAKIP.

#### 4. Core Values ASN BerAKHLAK

Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN di Basarnas, khususnya di Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun uraian singkat nilai-nilai core values tersebut seperti dibawah ini:

##### a. Berorientasi Pelayanan

Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam memberikan



pelayanan publik, seorang aparatur sipil negara harus selalu melakukan perbaikan tiada henti, baik dari peningkatan kompetensi maupun cara pelayanan, dengan cara Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.

Contoh penerapan pada Biro Perencanaan dan Keuangan salah satunya yaitu melakukan pelayanan dalam hal perencanaan program kegiatan, penganggaran dan evaluasi serta pelaporan kinerja. Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan secara sadar dan bersedia untuk memenuhi kebutuhan stakeholder baik unit kerja lain maupun instansi terkait, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada hentinya.

b. Akuntabel

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk dari pengertian tersebut, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, seorang ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Lebih penting dari itu, seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Contoh penerapan pada Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu para pegawai sudah menerapkan nilai ini cukup baik sesuai dengan nilai akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Seluruh pegawai juga melakukan pelaporan kinerja secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dari Pejabat Penilai Kinerja.

c. Kompeten

Seiring perkembangan waktu, dalam melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kompetensi ini sangat

penting, bahkan telah diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, Contoh penerapan pada Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu Pegawai tingkat inisiatif sudah cukup tinggi dengan selalu mengikuti perkembangan yang ada mengenai tugasnya masing-masing untuk mengupgrade kualitas dirinya dalam bekerja sehingga berkompetensi dalam bidangnya masing-masing, baik melalui Bimbingan Teknis, Coaching Clinic, Pelatihan, seminar, dan lain-lain.

d. Harmonis

Berakar dari Semboyan Negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda Namun Tetap Satu Jua”, seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Karena dengan kenyamanan lingkungan kerja ASN diyakini dapat lebih produktif.

Contoh penerapan pada Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu mengimplementasikan *Quick Action* Satu Jiwa Satu Rasa dalam keseharian sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, meskipun seluruh pegawai dilatar belakangi dari asal usul daerah yang berbeda-beda namun tetap saling menghargai, membantu dan nilai kekeluargaan yang dibangun seperti persaudaraan kandung tanpa memandang perbedaan. Rasa kepedulian antar pegawai juga tinggi untuk saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan atau sedang mengalami sakit Hal tersebut membuat lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

Loyalitas dan kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Dan tidak pada satu sosok atau

pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.

Contoh penerapan pada Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu seluruh sudah menerapkan loyalitas dengan selalu rutin dan lengkap seluruh pegawai dalam mengikuti kegiatan apel, briefing rutin dan selalu menjaga rahasia lingkup kerja, dan juga tetap menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

Adaptasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan.

Contoh penerapan pada Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu sudah dapat melaksanakan untuk beradaptasi dengan hal - hal yang ada seperti kondisi lingkungan masyarakat ataupun Unit Pelaksana Teknis yang memiliki domisili jauh dengan memberikan solusi-solusi baru yang tidak membuat masyarakat sulit dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

g. Kolaboratif

Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan, akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

Contoh penerapannya pada Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu pegawai dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan pelayanan yang ingin dicapai oleh Basarnas, Tetap menjaga hubungan dengan

instansi-instansi lain yang sudah mengadakan kerjasama, dan tetap melakukan perbaikan serta kolaborasi lainnya dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Dengan terbangunnya pemahaman yang baik dan benar tentang panduan perilaku dan contoh dari masing-masing nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana tertuang di atas, diharapkan para ASN dapat melaksanakan dengan baik aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana yang diharapkan. Pada akhirnya dapat terwujud PNS Profesional dengan karakter BerAKHLAK yang profesional.

Demikian Nilai-nilai dasar core value ASN yang sudah di uraikan diatas, diharapkan dapat di implementasikan dan menjadi panduan untuk para ASN di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan pemerintah serta perekat dan pemersatu bangsa dengan mengutamakan kepentingan dan kepuasan masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 179%. Realisasi Anggaran 98,6%, Capaian Output (RO) sebesar 100%. Pendapatan PNBPN Basarnas baru pertamakali dilaksanakan dan realisasinya melebihi yang telah ditargetkan sampai 816,58% menyebabkan realisasi Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sangat baik.

#### **B. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA**

Menindaklanjuti hasil pengukuran capaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk indikator kinerja yang realisasinya telah memenuhi target seluruh bidang di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan akan melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik sehingga keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dipertahankan dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk indikator kinerja yang realisasinya belum memenuhi target, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mencoba menerapkan program dan kegiatan yang lebih baik lagi, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

Untuk peningkatan capaian kinerja pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selain itu sebagai pendukung dalam tugas pelayanan pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Basarnas maka Biro Perencanaan dan Keuangan perlu terus meningkatkan pelaksanaan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan maupun di lingkungan Basarnas lainnya serta instansi/organisasi lain. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

### C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN oleh APIP BASARNAS

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi APIP

No.	Rekomendasi APIP	Rencana Aksi Tindak Lanjut Biro Renkeu
1.	Laporan Kinerja agar menyajikan nilai-nilai core value ASN (BerAKHLAK)	1. Nilai-nilai core value ASN (BerAKHLAK) telah disajikan pada Laporan Kinerja. 2. Akan diikutsertakannya pegawai untuk Bimtek profesionalisme <b>ASN</b> dan <b>Core Value Berakhlak ASN</b> .
2.	Rujukan standar nasional atau internasional dalam perbandingan realisasi kinerja agar disajikan lebih rinci dalam laporan kinerja.	Akan dilakukan reuiu IKU secara berkala agar dapat perbandingan dengan standar nasional/Internasional.
3.	Penyempurnaan penggunaan Teknologi Infomasi dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah menggunakan aplikasi Simonev/e-performance namun pada tahun 2024 sedang dalam tahap pengembangan.
4.	Informasi bahwa laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi disajikan dalam laporan kinerja secara rinci.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan guna peningkatan dan perbaikan kinerja pada satuan kerja .
5.	Setiap pelaksanaan evaluasi kegiatan agar disajikan dalam laporan	Telah disusunnya matriks hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi.

No.	Rekomendasi APIP	Rencana Aksi Tindak Lanjut Biro Renkeu
	kinerja disertai rekomendasi - rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan yang akan datang.	

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Biro Perencanaan dan Keuangan dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Biro Perencanaan dan Keuangan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Basarnas

## Daftar Pustaka

1. Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta.
2. Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
3. Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186*. Jakarta.
4. Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
5. Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.
6. Indonesia. 2021. *Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SP-DIPA-107.01/2021 Tahun 2021*. Jakarta.
7. Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP*. Jakarta.
8. Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
9. *Peraturan Menteri Menpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan*
10. *Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai untuk pegawai Basarnas*



## LAMPIRAN

**HASIL PENGUKURAN KINERJA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN T.A 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET PK	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	92,59	92,59%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	74,01	101,38%
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	88,77	93,44%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	<5%	<5%	100%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	100	100%
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	80	85,46	106,8%
		Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	85	92,31	108,6%
		Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP	100	816,58%	816,58%
		Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

## HASIL CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**  
 Jl. Angkasa Blok B. 15  
 Kav 3-3 Jakarta 10720  
<https://basarnas.go.id>  
 E-mail: [basarnas@basarnas.go.id](mailto:basarnas@basarnas.go.id)  
 Telp : (021) 65701116 / 65867510  
 Fax : (021) 65701152  
 Emergency : 115 – (021) 65862511  
 Emergency Fax : (021) 65867512

Lampiran Surat Sekretaris Utama  
 Nomor : B/97/PR.02.02/BSN-2025  
 Tanggal : 8 Januari 2025

Nomor : B/97/PR.02.02/BSN-2025 Jakarta, 8 Januari 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) lembar  
 Hal : Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

### CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

No.	Unit Kerja	Capaian Kinerja Organisasi Tahunan Tahun 2024
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Istimewa

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
 di  
 Tempat

Menunjuk Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah dilakukan penilaian capaian kinerja organisasi pada Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Utama. Capaian Kinerja Tahunan organisasi tersebut diperoleh dari capaian indikator kinerja, ekspektasi pimpinan, serta upaya perubahan proses/inovasi yang berdampak pada peningkatan hasil kerja unit kerja di Tahun 2024.

Terkait hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Capaian Kinerja Organisasi Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS  
 Pembina Utama Madya (IV/d)

### HASIL (PK dan Delivery Ekspektasi)

A = diatas ekspektasi	Kurang	Baik	Istimewa
S = sesuai ekspektasi	Kurang	Baik	Baik
B = dibawah ekspektasi	Sangat Kurang	Butuh Perbaikan	Butuh Perbaikan
	B = dibawah ekspektasi	S = sesuai ekspektasi	A = diatas ekspektasi

**PROSES**

Sekretaris Utama,



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS  
 Pembina Utama Madya (IV/d)